

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Sebagai negara agraris, Indonesia merupakan salah satu negara dengan tingkat konsumsi tertinggi pada komoditas padi, khususnya beras. Kebiasaan masyarakat yang sudah mengakar terhadap konsumsi beras membuatnya menjadi salah satu faktor terpenting dari ketahanan pangan nasional. Ketua Konsorsium Indonesia Sehat, Winaryo menyatakan bahwa konsumsi beras per kapita Indonesia sepanjang tahun 2014 mencapai 139 kg atau sekitar 900 gram per orang per hari. (BKPD Jabar, 2014)

Meski demikian, permasalahan seputar pengadaan beras hingga kini masih menjadi polemik. Menurut data Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum Bulog) yang bergerak di bidang pengelolaan logistik pangan, realisasi pengadaan beras dalam negeri atau penyerapan beras produksi petani oleh Perum Bulog hingga Desember 2014 hanya mencapai 84 persen atau 2,5 juta ton dari target sebesar 3 juta ton. Diakui oleh pelaksana tugas Direktur Umum Perum Bulog, Budi Purwanto pengadaan beras dalam negeri tahun 2014 menurun jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2013 yang mencapai 3,4 juta ton. Sementara untuk 2015, Budi Purwanto menargetkan pengadaan beras akan ditingkatkan hingga 3,2 juta ton. (Kompas, 29 Desember 2014)

Namun pencapaian atas pernyataan tersebut dianggap pesimis oleh sejumlah pihak. Pasalnya, memasuki awal tahun 2015, masyarakat mengalami problematika dikarenakan harga beras yang melonjak naik. Sebagian besar pedagang mengaku harus menaikkan harga beras karena berkurangnya stok yang diterima dari gudang dan hal itu disebabkan oleh musim paceklik.

Kenaikan harga yang diakibatkan kelangkaan persediaan beras di pasar dinilai tidak wajar oleh banyak pihak. Seperti yang diungkapkan Gubernur Jawa

Barat, Ahmad Heryawan, menurut data Bulog persediaan beras di Provinsi Jawa Barat cukup hingga empat bulan mendatang. Berbeda dengan daerah penerima distribusi beras seperti Provinsi DKI Jakarta, tingkat persediaan beras di Jawa Barat yang notabene adalah Provinsi penghasil beras selalu berada pada kondisi cukup, terlebih ketika sudah memasuki masa panen. Disebabkan oleh hal tersebut, maka tingkat harga beras yang meningkat dinilai tidak wajar. (Wartaekonomi, 25 Februari 2015)

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), sejak Februari 2015 harga beras melonjak tajam hingga 30 persen. Di pulau Jawa sendiri, harga beras jenis medium yang semula berkisar Rp. 8.000,- kini mengalami kenaikan hingga berada di kisaran Rp. 9500,-. Sedangkan untuk jenis premium dan pera masing-masing juga mengalami kenaikan harga hingga Rp. 3.500,- sampai Rp. 4.000,-. (Liputan6, 9 Maret 2015)

Keuntungan dari tingginya harga beras di hampir seluruh wilayah di Indonesia hanya dinikmati kalangan terbatas, yaitu pedagang beras, pengusaha, dan petani pasar, sedangkan petani kecil yang menghasilkan padi justru tidak merasakan laba karena sudah menjualnya saat panen. Bahkan sebagian petani terpaksa membeli kembali produksi padi dalam bentuk beras dengan harga mahal karena mereka juga mengkonsumsinya untuk kebutuhan sehari-hari.

Tak hanya petani, bagi rakyat umumnya, kenaikan harga beras memengaruhi pengeluaran sehari-hari. Bagi yang berpenghasilan tetap, daya beli mereka cukup signifikan terpengaruh karena beras menjadi mata pengeluaran penting. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), kenaikan harga beras memberikan kontribusi 26,92 persen terhadap kenaikan garis kemiskinan di wilayah perkotaan. Sementara di pedesaan, kontribusi tersebut lebih besar lagi, jumlahnya mencapai 33,38 persen.

Sejumlah dugaan muncul terkait kenaikan harga beras. Dugaan pertama adalah karena ulah pemburu rente yang berharap kenaikan harga yang tajam bisa memaksa Pemerintah membuka keran impor. Dugaan lain adalah akibat permasalahan distribusi beras untuk rakyat miskin (RASKIN) yang terhenti sejak

tiga bulan terakhir. Mereka terpaksa membeli beras di pasar tradisional sehingga permintaan beras meningkat. Ada pula yang menduga lonjakan harga beras merupakan permainan mafia beras dengan melakukan penimbunan sehingga terjadi kelangkaan sampai musim panen berlangsung.

Untuk mengatasi masalah tersebut, Presiden Joko Widodo kembali menempuh cara *ad-hoc* (dibentuk untuk maksud tertentu), yaitu dengan memanfaatkan Cadangan Beras Pemerintah (CBP). CBP merupakan sejumlah beras tertentu milik Pemerintah yang sumber dananya berasal dari APBN dan dikelola oleh Bulog yang digunakan untuk mengantisipasi masalah kekurangan pangan, keadaan darurat akibat bencana dan terjadinya gejolak harga. Keputusan tersebut dilaksanakan dengan menggelar Operasi Pasar (OP) di sejumlah daerah. Langkah itu sebenarnya hanya mengulang cara lama seperti yang dilakukan lima presiden sebelumnya.

Beberapa daerah di Provinsi Jawa Barat seperti Kota Bandung, Ciamis, Kota Bogor, Kota Tasikmalaya serta sejumlah kabupaten dan kota lainnya juga sudah menggelar Operasi Pasar Beras sejak akhir Februari 2015 lalu. Sayangnya, Operasi Pasar ini menuai banyak kekecewaan terhadap masyarakat karena kualitas beras yang buruk. Contohnya seperti di Kota Tasikmalaya, warga mengaku kecewa karena kualitas beras yang seharusnya berjenis medium yang dijual seharga Rp 7.400,- per kg ternyata sama dengan beras RASKIN yang biasanya dijual seharga Rp 2.000,- per kg. Selain itu, Operasi Pasar secara teknis seharusnya diselenggarakan di pasar-pasar tradisional agar pedagang bisa menyesuaikan harga, bukan di Kantor Kecamatan. (Metrotvnews, 28 Februari 2015)

Sedangkan seperti dilansir oleh surat kabar Pikiran Rakyat (24 Maret 2015), beberapa daerah yang menggelar Operasi Pasar menjelaskan bahwa kuota Cadangan Beras yang dibagikan oleh Bulog belum mencukupi untuk memenuhi jumlah permintaan masyarakat. Banyak pembeli yang mengungkapkan bahwa persediaan Cadangan Beras di tempat dilaksanakan Operasi Pasar tersebut sudah habis sebelum sempat membeli.

Menanggapi persoalan tersebut, Menteri Perdagangan Indonesia, Rachmat Gobel menganjurkan untuk melakukan audit dan evaluasi terhadap sistem pengendalian Cadangan Beras pada Operasi Pasar oleh Perum Bulog karena dinilai belum efektif untuk menstabilkan harga. Pasalnya, Pemerintah mendapat sejumlah laporan bahwa beras yang masuk pada Operasi Pasar di beberapa daerah bukan berasal dari gudang Perum Bulog dan Perum Bulog membenarkan bahwa dalam beberapa hari tersebut tidak melakukan pengiriman. Pertimbangan tersebut juga didasari oleh laporan warga yang mengeluh akibat kualitas beras yang tak layak konsumsi. (Sindo, 27 Maret 2015)

Bersamaan dengan munculnya fenomena penggunaan Cadangan Beras Pemerintah untuk Operasi Pasar, Rachmat Gobel juga menilai jumlah CBP di Indonesia yang dimiliki Pemerintah hanya 350 ribu ton dari total produksi rata-rata 3 juta ton setiap tahunnya. Jumlah ini tergolong kecil bila dibandingkan dengan negara pengonsumsi padi lainnya seperti Thailand (2 juta ton), Vietnam (1,1 juta ton), dan Filipina (750 ribu ton). Harga beras di pasar yang semakin meningkat dan persediaan cadangan yang terus terkuras menghambat Pemerintah dalam pengendalian gejolak harga. (Gatra, 2 April 2015)

Pengendalian persediaan merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh organisasi sebagai upaya untuk menjaga agar persediaan yang dimiliki tetap stabil dalam kualitas dan kuantitas, dapat menghindari peningkatan biaya akibat pembelian yang dilakukan dalam jumlah kecil, serta meningkatkan kinerja organisasi secara optimal. Sebagai perusahaan umum yang memiliki tugas pelayanan publik dalam hal pangan, Perum Bulog berkewajiban untuk menjaga dan mengelola baik dari sisi kuantitas maupun kualitas persediaan pangan.

Dalam usaha pengendalian persediaan terdapat tiga aspek yang perlu dipertimbangkan sebagai penilaian apakah sistem pengelolaan persediaan tersebut telah mampu melindungi kualitas dan kuantitas aset sebagai jaminan kepuasan pembeli. Adapun menurut Freddy Rangkuti (2010:11) aspek tersebut adalah sistem pengadaan persediaan, penentuan jumlah persediaan, dan sistem administrasi pencatatan dan pemantauan persediaan.

Perum Bulog sudah menggunakan sistem informasi akuntansi yang disebut Sistem Informasi Akuntansi Bulog (SIAB) berbasis teknologi komputer dalam kegiatannya sejak tahun 2000 untuk menunjang kualitas laporan keuangan. Namun, karena rutinitas untuk menyelesaikan laporan keuangan semakin tinggi, pengendalian internal serta analisa akuntansi relatif menjadi lemah. Sedangkan untuk informasi laporan persediaan menggunakan sistem informasi akuntansi persediaan yang disebut Sistem Informasi Logistik (SIL), dengan tujuan meningkatkan kontrol untuk memantau persediaan di gudang, aliran barang masuk dan keluar dari gudang.

Penelitian mengenai implementasi sistem informasi akuntansi pernah dilakukan oleh Muanas (2005), dimana ditemukan bahwa dalam penerapannya terdapat kelemahan-kelemahan yang timbul akibat kelalaian atau dilanggarnya sistem dan prosedur yang ditetapkan perusahaan oleh para pelaksana atau terkadang oleh para pengambil keputusan itu sendiri, serta kurangnya tenaga operasional untuk mengontrol keluar masuknya barang pada fungsi penyimpanan.

Timbulnya perbandingan antara teori ilmiah dan fenomena di atas, diperlukan adanya tinjauan ulang atas sistem informasi akuntansi persediaan beras. Sehingga penelitian ini diberi judul “Analisis Implementasi Sistem Informasi Akuntansi Persediaan dan Pengaruhnya Terhadap Efektivitas Pengendalian Persediaan Beras (Studi Kasus pada Sub Divisi Regional Perum Bulog di Jawa Barat)”

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan:

1. Bagaimana implementasi sistem informasi akuntansi persediaan pada Perum Bulog?
2. Apakah pengendalian persediaan pada Perum Bulog sudah efektif?
3. Apakah terdapat hubungan antara implementasi sistem informasi akuntansi persediaan dengan efektivitas pengendalian persediaan pada Perum Bulog?

4. Seberapa besar pengaruh implementasi sistem informasi akuntansi persediaan terhadap efektivitas pengendalian persediaan?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Dari permasalahan di atas, dapat diketahui tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui implementasi sistem informasi akuntansi persediaan pada Perum Bulog
2. Untuk mengetahui apakah pengendalian persediaan pada Perum Bulog sudah efektif
3. Untuk mengetahui apakah terdapat hubungan implementasi sistem informasi akuntansi persediaan dengan efektivitas pengendalian persediaan pada Perum Bulog
4. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh implementasi sistem informasi akuntansi persediaan terhadap efektivitas pengendalian persediaan.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

Manfaat Teoritis

1. Sebagai sumbangan pemikiran dalam kajian terkait dengan implementasi sistem informasi akuntansi persediaan dan pengaruhnya terhadap efektivitas pengendalian persediaan
2. Sebagai bahan referensi dan studi bagi penelitian selanjutnya.

Manfaat Praktis

1. Sebagai bahan evaluasi dan masukan bagi Perum Bulog serta instansi yang terkait dalam implementasi sistem informasi akuntansi persediaan dan efektivitas pengendalian persediaan.